

# DUNIA MULTIPOLAR ABAD ke-21:

DARI HEGEMONI TUNGGAL  
KE PERSAINGAN BANYAK KUTUB



*-By: Rudy C Tarumingkeng -*

*Rudy C Tarumingkeng:* **Dunia Multipolar Abad ke-21: Dari Hegemoni  
Tunggal ke Persaingan Banyak Kutub**

Oleh:

**Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD**

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyc75@gmail.com](mailto:rudyc75@gmail.com)

29 March 2026

## **DUNIA MULTIPOLAR ABAD KE-21: DARI HEGEMONI TUNGGAL KE PERSAINGAN BANYAK KUTUB**

### **Abstrak**

Makalah ini membahas transformasi tatanan internasional abad ke-21 dari konfigurasi yang lama dipahami sebagai hegemoni tunggal menuju pola persaingan banyak kutub yang lebih kompleks, cair, dan berlapis. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat sempat dipandang sebagai satu-satunya kekuatan dominan dalam apa yang populer disebut sebagai *unipolar moment*. Namun, perkembangan ekonomi global, kebangkitan Tiongkok dan India, konsolidasi Uni Eropa sebagai aktor regulatif, meningkatnya peran Rusia dalam konflik kawasan, menguatnya forum Global South seperti BRICS, serta bertambah pentingnya aktor-aktor menengah telah menggeser struktur itu menuju distribusi kekuasaan yang lebih tersebar. Di saat yang sama, bidang-bidang baru seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, semikonduktor, data, energi, dan rantai pasok global telah menjadikan polaritas dunia tidak lagi hanya ditentukan oleh ukuran militer, tetapi juga oleh kapasitas produksi, kemampuan inovasi, pengaruh institusional, dan kuasa normatif. Makalah ini berargumen bahwa dunia multipolar kontemporer bukan sekadar kembalinya pola klasik persaingan negara besar, melainkan munculnya sistem yang ditandai oleh tumpang tindih antara unipolaritas militer, multipolaritas ekonomi, fragmentasi geoekonomi, dan kompetisi normatif. Karena itu, stabilitas

global tidak lagi dapat dijaga hanya melalui dominasi satu hegemon, tetapi memerlukan tata kelola kolaboratif, reformasi institusi internasional, dan peran aktif negara-negara menengah seperti Indonesia. Bagi Indonesia, dunia multipolar membuka peluang untuk memperluas ruang diplomasi, diversifikasi kemitraan, dan memperkuat posisi sebagai *bridge-builder* antara Utara dan Selatan Global, sekaligus menuntut kewaspadaan terhadap risiko keterbelahan blok, disrupsi perdagangan, dan perebutan teknologi strategis. ([Foreign Affairs](#))

### **Kata Kunci**

*multipolaritas; hegemoni; unipolaritas; geopolitik; geoekonomi; Global South; BRICS; tata kelola global; persaingan kekuatan besar; Indonesia*

## **Dunia Multipolar Abad ke-21: Dari Hegemoni Tunggal ke Persaingan Banyak Kutub**

### **Pendahuluan**

Dalam wacana hubungan internasional, abad ke-21 semakin sering dipahami sebagai abad pergeseran. Pergeseran itu tidak hanya menyangkut perubahan pusat pertumbuhan ekonomi dari Atlantik ke Asia, tetapi juga perubahan lebih mendasar tentang siapa yang menetapkan agenda global, siapa yang mengendalikan teknologi strategis, siapa yang menguasai rantai pasok, dan siapa yang memiliki legitimasi untuk mendefinisikan "aturan main" internasional. Jika dekade 1990-an ditandai oleh optimisme liberal tentang satu pusat kekuasaan yang dianggap mampu menjaga stabilitas dunia, maka dekade 2020-an justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda: kompetisi terbuka antarnegara besar, melemahnya konsensus multilateral, meningkatnya proteksionisme

teknologi, dan menguatnya suara negara-negara Global South dalam forum-forum internasional. ([Foreign Affairs](#))

Istilah “dunia multipolar” menjadi penting bukan karena ia sekadar menawarkan label baru, melainkan karena ia membantu menjelaskan mengapa politik global kini tampak lebih tidak pasti dibandingkan masa pasca-Perang Dingin. Di satu sisi, Amerika Serikat masih mempertahankan keunggulan besar, terutama dalam kemampuan proyeksi militer global. Di sisi lain, ekonomi dunia tidak lagi bertumpu pada satu pusat tunggal. Data IMF untuk 2025 menunjukkan bahwa PDB nominal dunia diproyeksikan sekitar US\$123,58 triliun, dengan Amerika Serikat sekitar US\$31,82 triliun, Tiongkok sekitar US\$20,65 triliun, Uni Eropa sekitar US\$22,52 triliun, dan India sekitar US\$4,51 triliun. Distribusi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi global telah tersebar ke beberapa pusat besar, bukan lagi terkonsentrasi secara tunggal. ([IMF](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan bagaimana dunia bergerak dari hegemoni tunggal ke persaingan banyak kutub, apa saja penanda utamanya, dan mengapa perubahan ini penting bagi kebijakan internasional maupun bagi Indonesia. Pembahasan akan dimulai dari kerangka konseptual polaritas, dilanjutkan dengan uraian tentang momen unipolar pasca-Perang Dingin, proses erosi hegemoni tunggal, karakter dunia multipolar kontemporer, serta peluang dan risikonya bagi tata kelola global. Pada bagian akhir, makalah ini menempatkan Indonesia sebagai contoh negara menengah yang perlu membaca multipolaritas bukan sebagai ancaman semata, tetapi juga sebagai ruang strategi. ([Columbia University](#))

## **1. Kerangka Konseptual: Hegemoni, Unipolaritas, dan Multipolaritas**

Dalam teori hubungan internasional, polaritas merujuk pada distribusi kapabilitas utama di dalam sistem internasional. Sistem disebut bipolar jika dua kekuatan besar mendominasi struktur, unipolar jika satu negara memiliki keunggulan material yang sangat jauh di atas negara lain, dan

multipolar jika tiga atau lebih kekuatan besar menjadi pusat perhitungan strategis negara-negara lain. Kenneth Waltz menilai bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet, sistem internasional bergerak ke arah unipolaritas, tetapi sekaligus menegaskan bahwa unipolaritas adalah konfigurasi yang paling tidak tahan lama. Charles Krauthammer, dari sudut yang berbeda, menyebut awal 1990-an sebagai *the unipolar moment*, yakni fase ketika Amerika Serikat tampak tidak memiliki pesaing seimbang dalam urusan global. ([Foreign Affairs](#))

Namun, konsep polaritas dalam abad ke-21 tidak bisa lagi dipahami hanya melalui ukuran kekuatan militer. Joseph Nye menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dapat berbeda antarbidang: dunia dapat tetap sangat terpusat pada level militer, tetapi lebih menyebar pada level ekonomi dan transnasional. Dalam salah satu rumusannya, Nye menekankan bahwa Amerika Serikat masih merupakan satu-satunya negara yang mampu memproyeksikan kekuatan militer secara global, sementara ekonomi internasional telah lama menunjukkan unsur multipolaritas, terutama bila Eropa dilihat sebagai satu entitas. Pandangan ini penting karena membantu kita memahami bahwa dunia hari ini sesungguhnya tidak sepenuhnya unipolar ataupun sepenuhnya multipolar; ia bersifat berlapis. ([Chatham House](#))

Richard Haass bahkan mengusulkan istilah *nonpolarity* untuk menggambarkan penyebaran kekuasaan yang tidak hanya berpindah dari Barat ke Timur, tetapi juga dari negara ke organisasi internasional, perusahaan teknologi, pasar keuangan, jaringan transnasional, dan aktor non-negara lainnya. Meskipun istilah ini tidak diterima secara universal, gagasan Haass memberi peringatan penting: pada abad ke-21, negara besar tetap sentral, tetapi mereka tidak lagi memonopoli seluruh sumber pengaruh. Perusahaan digital, lembaga pemeringkat, platform AI, pengendali data, serta simpul-simpul rantai pasok dapat memengaruhi arah politik global hampir sebesar keputusan negara. Karena itu, pembahasan multipolaritas abad ke-21 harus memasukkan kekuasaan

material, institusional, teknologi, dan normatif secara sekaligus. ([Foreign Affairs](#))

## **2. Momen Unipolar Pasca-Perang Dingin**

Setelah pembubaran Uni Soviet, Amerika Serikat memasuki fase dominasi yang luar biasa. Ia unggul dalam belanja militer, kekuatan aliansi, inovasi teknologi, pengaruh lembaga internasional, kapasitas finansial, dan daya tarik budaya. Dalam suasana itu, banyak pengamat mengira bahwa sistem internasional akan bergerak menuju tata dunia yang relatif stabil di bawah kepemimpinan AS. Dominasi ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal kemampuan menetapkan norma: liberalisasi perdagangan, demokratisasi, globalisasi finansial, dan institusionalisasi tata kelola global berlangsung di bawah pengaruh kuat lembaga dan gagasan yang dipimpin Barat. Inilah fondasi dari apa yang sering disebut "liberal international order". ([Foreign Affairs](#))

Akan tetapi, momen unipolar itu sesungguhnya mengandung benih keterbatasannya sendiri. Pertama, globalisasi yang dipromosikan oleh pusat hegemonik justru membuka ruang bagi kebangkitan ekonomi kekuatan lain, terutama Tiongkok. Kedua, intervensi militer yang mahal dan berkepanjangan menggerus legitimasi dan kapasitas strategis hegemon. Ketiga, integrasi ekonomi global menciptakan saling ketergantungan yang membuat dominasi tunggal semakin sulit dijalankan tanpa resistensi. Waltz mengingatkan bahwa negara-negara akan cenderung menyeimbangkan kekuasaan yang terlalu besar, sementara Haass menilai bahwa penyebaran sumber daya dan pengaruh pada akhirnya akan membuat dunia semakin sulit dikendalikan oleh satu pusat tunggal. Dengan kata lain, unipolaritas mungkin kuat pada awalnya, tetapi tidak mudah dipertahankan. ([Columbia University](#))

## **3. Erosi Hegemoni Tunggal: Faktor-faktor Utama**

Faktor pertama yang mengikis hegemoni tunggal adalah pergeseran ekonomi global. Kenaikan Tiongkok dari basis manufaktur ke pusat kekuatan industri, ekspor, teknologi, dan pembiayaan infrastruktur global adalah penanda paling nyata. Bersamaan dengan itu, India tumbuh sebagai ekonomi besar yang semakin diperhitungkan, sementara Uni Eropa tetap mempertahankan bobot ekonomi dan pengaruh regulatif yang signifikan. Data IMF untuk 2025 menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih terbesar secara nominal, tetapi bobot Tiongkok, Uni Eropa, dan India menegaskan bahwa ekonomi dunia tidak lagi ditopang oleh satu poros tunggal. Distribusi PDB global ini adalah dasar material dari multipolaritas kontemporer. ([IMF](#))

Faktor kedua adalah kembalinya persaingan keamanan dan militer. Data SIPRI menunjukkan bahwa belanja militer global mencapai US\$2,718 triliun pada 2024, naik 9,4 persen secara riil dan menjadi kenaikan tahunan paling tajam sejak setidaknya akhir Perang Dingin. Lima pembelanja terbesar—Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jerman, dan India—menyumbang 60 persen dari total pengeluaran militer dunia. NATO sendiri mencapai sekitar 55 persen belanja militer global. Data ini mengindikasikan dua hal sekaligus: pertama, keunggulan AS dan aliansinya masih sangat besar; kedua, pusat-pusat kekuatan lain telah cukup kuat untuk mengakhiri ilusi dominasi tunggal yang tanpa tandingan. ([SIPRI](#))

Faktor ketiga adalah geoekonomi dan fragmentasi perdagangan. WTO pada 2025 mencatat bahwa gelombang tarif baru dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan memaksa penurunan proyeksi perdagangan barang dunia; WTO bahkan memperingatkan bahwa jika tarif timbal balik dan ketidakpastian menyebar lebih luas, volume perdagangan barang dunia pada 2025 dapat turun 1,5 persen. World Bank juga menegaskan bahwa pertumbuhan global melemah karena kenaikan tajam hambatan perdagangan dan tingginya ketidakpastian kebijakan. Ini menunjukkan bahwa tatanan perdagangan global kini tidak lagi sepenuhnya digerakkan oleh logika efisiensi, tetapi juga oleh logika

keamanan nasional, perlindungan industri strategis, dan persaingan antarblok.

Faktor keempat adalah revolusi teknologi strategis. Semikonduktor, kecerdasan buatan, komputasi awan, data, dan infrastruktur digital kini menjadi sumber kekuasaan baru. OECD menegaskan bahwa rantai nilai semikonduktor sangat kompleks, tersebar lintas negara, tetapi mengandung konsentrasi dan kerentanan pada segmen tertentu. WTO pada World Trade Report 2025 juga menekankan bahwa AI dapat menjadi pendorong pertumbuhan baru, namun manfaatnya hanya akan meluas jika kerja sama internasional mampu mencegah fragmentasi lebih dalam. Dengan demikian, kekuasaan global abad ke-21 tidak cukup diukur dari kapal induk atau cadangan devisa, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan standar, cip, data, dan platform. ([OECD](#))

#### **4. Ciri-ciri Dunia Multipolar Kontemporer**

Ciri pertama dunia multipolar kontemporer adalah distribusi kekuasaan yang asimetris antarbidang. Dalam militer, AS masih unggul. Dalam ekonomi, pusat-pusat besar telah lebih menyebar. Dalam teknologi, tidak ada satu negara yang sepenuhnya mandiri karena produksi, desain, material, peralatan, dan pasar saling terkait lintas kawasan. Dalam tata kelola normatif, Uni Eropa memiliki pengaruh yang besar lewat regulasi, Tiongkok melalui kapasitas industri dan skala pasar, Amerika Serikat melalui ekosistem inovasi dan aliansi, sementara negara-negara Global South mulai menuntut representasi yang lebih seimbang dalam lembaga internasional. Maka, multipolaritas hari ini bukan simetri sempurna, melainkan mosaik kekuasaan. ([Chatham House](#))

Ciri kedua adalah kembalinya politik blok, tetapi dalam bentuk yang lebih lentur daripada masa Perang Dingin. Negara-negara tidak selalu terkunci dalam satu blok ideologis. Banyak negara kini mempraktikkan strategi *multi-alignment*: bermitra ekonomi dengan satu kekuatan, bekerja sama keamanan dengan kekuatan lain, dan tetap menjaga otonomi kebijakan

luar negeri. India adalah contoh yang sering dibahas: ia aktif dalam BRICS, tetapi juga mempererat kerja sama dengan negara-negara Barat. Indonesia pun memperlihatkan kecenderungan serupa dengan tetap aktif di G20, ASEAN, dan pada saat yang sama tercatat sebagai anggota BRICS pada 2025. Pola ini menunjukkan bahwa multipolaritas tidak otomatis identik dengan pembelahan yang kaku, melainkan dengan fleksibilitas aliansi yang tinggi. ([BRICS Brasil](#))

Ciri ketiga adalah melemahnya legitimasi lembaga global lama bersamaan dengan bertambahnya tekanan untuk reformasi. Masuknya Uni Afrika sebagai anggota tetap G20 pada 2023 merupakan simbol penting dari perluasan representasi Global South dalam tata kelola ekonomi dunia. Demikian pula, perluasan BRICS menjadi sebelas anggota pada 2025 menunjukkan dorongan kuat dari negara-negara non-Barat untuk membangun forum koordinasi politik dan ekonomi yang lebih mencerminkan perubahan distribusi kekuatan global. Kedua perkembangan ini menandakan bahwa multipolaritas bukan hanya soal kekuatan material, tetapi juga soal perjuangan legitimasi institusional. ([G20](#))

Ciri keempat adalah munculnya persaingan normatif di ruang digital dan teknologi. PBB melalui *Pact for the Future* dan *Global Digital Compact*, yang diadopsi pada September 2024, menegaskan perlunya kerangka global yang inklusif untuk kerja sama digital dan tata kelola AI. Kehadiran agenda ini menunjukkan bahwa konflik antar-kutub kini juga menyangkut nilai dan aturan: bagaimana data dikelola, bagaimana AI diawasi, bagaimana keamanan siber dijaga, dan siapa yang menetapkan standar internasional. Pada titik ini, dunia multipolar bukan hanya perebutan wilayah dan sumber daya, tetapi juga perebutan arsitektur normatif masa depan. ([United Nations](#))

## **5. Arena-Arena Utama Persaingan Banyak Kutub**

Arena pertama adalah persaingan Amerika Serikat–Tiongkok. Ini merupakan poros paling menonjol dalam politik global kontemporer karena menyentuh ekonomi, teknologi, militer, dan ideologi tata kelola. Persaingan ini bukan sekadar perang tarif, melainkan perebutan kendali atas industri masa depan, dari cip hingga AI. WTO dan World Bank menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan telah menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan dan perdagangan global. Dalam konteks ini, rivalitas AS–Tiongkok berfungsi sebagai mesin utama multipolaritas: bukan karena keduanya saja yang penting, tetapi karena hubungan keduanya membentuk pilihan strategis hampir semua aktor lain.

Arena kedua adalah Rusia versus Barat, terutama sejak perang Rusia–Ukraina yang mempercepat perubahan peta keamanan Eropa. SIPRI mencatat bahwa perang dan ketegangan geopolitik mendorong lonjakan belanja militer, terutama di Eropa dan Timur Tengah. Belanja militer Eropa pada 2024 mencapai US\$693 miliar, sementara Ukraina mengalokasikan porsi luar biasa besar dari PDB-nya untuk pertahanan. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa multipolaritas abad ke-21 juga diwarnai oleh kembalinya perang antarnegara sebagai faktor pembentuk sistem, sesuatu yang sebelumnya diasumsikan telah berkurang dalam era globalisasi.

([SIPRI](#))

Arena ketiga adalah kebangkitan negara-negara menengah dan Global South. BRICS yang melebar, keanggotaan Uni Afrika di G20, dan meningkatnya tuntutan representasi yang lebih adil menunjukkan bahwa dunia tidak lagi bersedia menerima tata kelola yang dianggap terlalu Barat-sentris. Namun, Global South bukanlah blok yang homogen. Kepentingan Brasil, India, Indonesia, Afrika Selatan, Saudi Arabia, atau Uni Afrika tidak selalu sama. Yang sama adalah keinginan untuk ruang tawar yang lebih besar, akses pembiayaan yang lebih seimbang, dan reformasi institusi global yang dianggap belum mencerminkan realitas abad ke-21. Inilah salah satu ciri khas multipolaritas modern: pluralitas aktor meningkat, tetapi koherensi di antara mereka tidak otomatis terbentuk. ([BRICS Brasil](#))

Arena keempat adalah tata kelola ekonomi dan teknologi global. WTO pada 2025 menunjukkan bagaimana perdagangan dan AI saling memengaruhi, sementara OECD menyoroti kerentanan rantai nilai semikonduktor. Artinya, persaingan dunia tidak lagi bisa dipisahkan dari kebijakan industri, kontrol ekspor, keamanan rantai pasok, dan penguasaan data. Negara yang unggul bukan hanya yang kuat secara militer, melainkan juga yang mampu memadukan strategi industri, riset, pembiayaan, dan diplomasi teknologi. Karena itu, konflik abad ke-21 cenderung berlangsung di ruang yang lebih senyap tetapi sangat menentukan: laboratorium, pusat data, pelabuhan, standar teknis, dan ekosistem inovasi. ([World Trade Organization](#))

## **6. Multipolaritas: Peluang dan Risiko**

Secara normatif, multipolaritas sering dipandang lebih adil karena membuka ruang bagi distribusi pengaruh yang lebih luas. Dalam sistem yang tidak didominasi satu hegemon, negara-negara menengah memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *hedging*, diversifikasi mitra, dan membangun koalisi isu. Forum seperti G20 dan BRICS memperlihatkan bahwa agenda dunia kini lebih sulit ditentukan sepihak. Dari sudut ini, multipolaritas bisa dilihat sebagai koreksi terhadap ketimpangan representasi global. Negara-negara berkembang memperoleh ruang lebih besar untuk menyuarakan kepentingan pembangunan, pembiayaan iklim, reformasi lembaga keuangan internasional, dan tata kelola digital yang lebih inklusif. ([G20](#))

Namun, dari sisi stabilitas, multipolaritas membawa risiko yang tidak kecil. Teori realis klasik sering mengingatkan bahwa semakin banyak pusat kekuatan besar, semakin kompleks pula kalkulasi aliansi, pencegahan, dan salah persepsi. Dalam sistem yang lebih cair, negara dapat berubah mitra secara cepat, konflik kawasan dapat menjalar ke persaingan global, dan perdagangan dapat dipersenjatai melalui tarif, sanksi, atau kontrol ekspor. Peringatan WTO tentang dampak ketidakpastian perdagangan serta

penilaian World Bank bahwa hambatan perdagangan telah menekan prospek pertumbuhan menunjukkan bahwa biaya ekonomi dari multipolaritas yang tidak terkelola bisa sangat tinggi. ([Columbia University](#))

Risiko lainnya adalah munculnya multipolaritas yang timpang. Dunia bisa saja menjadi “banyak kutub” secara formal, tetapi tidak seimbang dalam kemampuan riil. Amerika Serikat mungkin tetap unggul dalam militer; Tiongkok dalam skala manufaktur; Uni Eropa dalam regulasi; perusahaan teknologi dalam infrastruktur digital; dan beberapa kawasan lain dalam sumber daya strategis. Konfigurasi seperti ini menghasilkan kompetisi yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme lama. Ketika isu energi, iklim, keamanan siber, utang, dan AI bertemu dalam satu ruang konflik, sistem internasional menjadi lebih rentan terhadap kebuntuan kebijakan. *Global Digital Compact* justru lahir dari kesadaran bahwa tanpa kerangka kerja sama, ruang digital dapat menjadi arena fragmentasi baru. ([United Nations](#))

## 7. Indonesia dalam Dunia Multipolar

Bagi Indonesia, dunia multipolar menghadirkan kombinasi peluang dan kehati-hatian strategis. Sebagai negara demokrasi besar, ekonomi berkembang utama, anggota G20, dan tercatat sebagai anggota BRICS pada 2025, Indonesia memiliki posisi yang menarik: tidak sepenuhnya berada di dalam orbit Barat, tetapi juga bukan satelit kekuatan non-Barat mana pun. Posisi ini memberi keuntungan diplomatik karena Indonesia dapat memaksimalkan perannya sebagai penghubung lintas-kawasan, pendorong dialog, dan pengusul reformasi tata kelola global yang lebih inklusif. Kehadiran di berbagai forum sekaligus memungkinkan Indonesia membangun portofolio kemitraan yang lebih beragam. ([G20](#))

Akan tetapi, ruang strategi itu hanya bermanfaat bila ditopang kapasitas domestik. Dalam dunia multipolar, negara yang hanya menjadi pasar akan mudah terseret ke dalam kompetisi pihak lain. Karena itu, strategi Indonesia tidak dapat berhenti pada diplomasi simbolik. Indonesia perlu

memperkuat industri bernilai tambah, ketahanan energi, kemandirian pangan, literasi digital, kualitas SDM, dan kesiapan teknologi strategis. WTO dan OECD menunjukkan bahwa perdagangan, AI, dan semikonduktor kini berada di jantung perubahan global. Negara yang tidak memiliki basis industri dan inovasi akan sulit memanfaatkan multipolaritas; ia hanya akan menjadi objek relokasi rantai pasok, bukan subjek pembentuk aturan.

([World Trade Organization](#))

Dari sudut kebijakan luar negeri, Indonesia perlu menghindari jebakan pilihan biner. Dalam dunia banyak kutub, strategi terbaik bukan sekadar “memilih pihak”, tetapi membangun kemampuan untuk bekerja dengan banyak pihak tanpa kehilangan otonomi. Ini memerlukan diplomasi yang cermat: memperkuat ASEAN sebagai jangkar kawasan, aktif dalam G20 untuk isu ekonomi global, menggunakan BRICS sebagai kanal dialog Selatan Global, dan tetap menjaga kerja sama dengan mitra tradisional dalam investasi, pendidikan, teknologi, dan keamanan. Multipolaritas akan menguntungkan Indonesia bila direspons dengan *strategic flexibility*; sebaliknya, ia akan berbahaya bila dihadapi dengan kebijakan yang reaktif dan jangka pendek. ([BRICS Brasil](#))

## 8. Menuju Tata Kelola Global yang Lebih Kooperatif

Dunia multipolar tidak otomatis berarti dunia yang lebih damai. Sejarah justru menunjukkan bahwa perubahan distribusi kekuasaan sering melahirkan ketegangan transisi. Karena itu, tantangan utamanya bukan hanya menerima kenyataan bahwa dunia telah menjadi lebih plural, tetapi membangun mekanisme agar pluralitas itu tidak berubah menjadi kekacauan. Reformasi lembaga internasional, penguatan aturan perdagangan yang kredibel, transparansi kebijakan industri, tata kelola AI yang inklusif, dan pengurangan kesenjangan digital adalah syarat minimal untuk menjaga stabilitas. PBB, WTO, World Bank, dan forum-forum lintas-kutub harus beradaptasi agar tidak kehilangan legitimasi. ([United Nations](#))

Dalam hal ini, *middle powers* memegang peranan penting. Ketika kekuatan besar saling curiga, negara-negara menengah dapat menjadi perantara agenda bersama, terutama pada isu yang melintasi blok seperti perubahan iklim, kesehatan global, pembiayaan pembangunan, dan keamanan digital. Nilai tambah negara menengah bukan pada dominasi, tetapi pada kemampuan membangun jembatan dan koalisi isu. Indonesia, Brasil, India, Afrika Selatan, dan negara-negara lain dapat memainkan peran ini, asalkan mereka tidak sekadar menjadi arena persaingan proksi. Multipolaritas yang sehat membutuhkan bukan hanya banyak kutub, tetapi juga banyak penghubung. ([BRICS Brasil](#))

## Penutup

Abad ke-21 memperlihatkan bahwa momen hegemoni tunggal tidak bertahan selamanya. Dominasi Amerika Serikat sesudah Perang Dingin memang pernah sangat menonjol, tetapi perkembangan ekonomi global, kebangkitan kekuatan-kekuatan baru, kembalinya rivalitas militer, meluasnya fragmentasi perdagangan, dan lahirnya teknologi strategis baru telah mengubah lanskap itu secara mendasar. Dunia saat ini tidak dapat lagi dijelaskan secara memadai dengan model unipolar yang sederhana. Yang muncul adalah konfigurasi lebih rumit: militer cenderung tetap terkonsentrasi, ekonomi makin tersebar, teknologi diperebutkan, dan institusi global mengalami tekanan legitimasi. ([Chatham House](#))

Dengan demikian, multipolaritas abad ke-21 tidak boleh dibaca secara romantik maupun fatalistik. Ia bukan otomatis jalan menuju keadilan global, tetapi juga bukan niscaya membawa kehancuran. Semuanya bergantung pada apakah negara-negara mampu membangun bentuk kerja sama baru yang sepadan dengan distribusi kekuasaan yang baru. Dalam dunia banyak kutub, stabilitas tidak lagi lahir dari kepatuhan pada satu pusat, melainkan dari kemampuan mengelola perbedaan, menahan eskalasi, dan menyusun aturan bersama di tengah kompetisi. Di situlah tantangan sesungguhnya dari era multipolar: bukan sekadar menerima

bahwa dunia telah berubah, tetapi belajar memerintah perubahan itu secara kolektif. ([Columbia University](#))

Bagi Indonesia, pelajaran paling penting adalah bahwa posisi strategis harus dibangun, bukan diasumsikan. Dunia multipolar menyediakan ruang untuk manuver, tetapi hanya negara yang memiliki kapasitas domestik, konsistensi diplomatik, dan visi jangka panjang yang dapat memanfaatkan ruang itu. Karena itu, agenda nasional seperti penguatan industri, pendidikan, inovasi, tata kelola digital, dan diplomasi ekonomi bukanlah urusan domestik semata; semuanya adalah bagian dari strategi bertahan dan tumbuh dalam sistem internasional yang semakin kompleks. Dunia multipolar bukan hanya peta baru dunia, melainkan juga ujian baru bagi kualitas kepemimpinan nasional. ([BRICS Brasil](#))

## **Glosarium**

### **BRICS**

Forum kerja sama negara-negara utama Global South yang pada 2025 mencakup sebelas anggota dan berfungsi sebagai kanal koordinasi politik, ekonomi, dan diplomatik. ([BRICS Brasil](#))

### **Geoekonomi**

Penggunaan instrumen ekonomi—tarif, sanksi, subsidi, kontrol ekspor, dan kebijakan industri—untuk mencapai tujuan strategis dan geopolitik.

### **Geopolitik**

Persaingan kekuasaan antarnegara yang dipengaruhi oleh faktor ruang, lokasi strategis, sumber daya, keamanan, dan pengaruh kawasan.

### **Global Digital Compact**

Kerangka global PBB untuk kerja sama digital dan tata kelola AI yang diadopsi bersama *Pact for the Future* pada 2024. ([United Nations](#))

### **Global South**

Kelompok longgar negara-negara berkembang yang menuntut representasi, keadilan, dan ruang tawar lebih besar dalam tata kelola global.

### **Hegemoni**

Kondisi ketika satu aktor memiliki kemampuan dominan untuk membentuk agenda, aturan, dan orientasi sistem internasional.

### **Ketidakpastian kebijakan perdagangan**

Situasi ketika pelaku ekonomi tidak dapat memperkirakan arah tarif, perjanjian dagang, atau aturan perdagangan, sehingga investasi dan perdagangan tertahan.

### **Middle power**

Negara berkekuatan menengah yang tidak dominan secara global, tetapi

memiliki kapasitas diplomatik untuk memediasi, membangun koalisi, dan memengaruhi agenda.

### **Multipolaritas**

Konfigurasi sistem internasional ketika tiga atau lebih pusat kekuatan besar memengaruhi struktur global secara bersamaan. ([Columbia University](#))

### **Nonpolarity**

Istilah yang menekankan bahwa kekuasaan tersebar tidak hanya di antara negara-negara besar, tetapi juga ke aktor non-negara, lembaga, dan jaringan transnasional. ([Foreign Affairs](#))

### **Polaritas**

Pola distribusi kapabilitas utama dalam sistem internasional.

### **Rantai pasok strategis**

Jaringan produksi dan distribusi untuk komoditas atau teknologi yang sangat penting bagi ekonomi dan keamanan, seperti semikonduktor. ([OECD](#))

### **Semikonduktor**

Komponen inti teknologi modern yang menjadi basis industri digital, AI, pertahanan, otomotif, dan telekomunikasi. ([OECD](#))

### **Soft power**

Kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, legitimasi, nilai, dan institusi, bukan paksaan.

### **Unipolar moment**

Fase pasca-Perang Dingin ketika Amerika Serikat dipandang sebagai kekuatan tunggal yang tidak tertandingi. ([Foreign Affairs](#))

## Daftar Pustaka (APA 7)

BRICS. (2025). *About the BRICS*. BRICS Presidency.

G20. (2023). *About G20*. G20 Secretariat.

Haass, R. N. (2008). *The age of nonpolarity*. *Foreign Affairs*.

International Monetary Fund. (2025). *World Economic Outlook (October 2025): GDP, current prices; Real GDP growth*. IMF.

Krauthammer, C. (1990). *The unipolar moment*. *Foreign Affairs*.

Nye, J. S., Jr. (2011). *The future of power*. Chatham House.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Mapping the semiconductor value chain*. OECD.

Stockholm International Peace Research Institute. (2025). *Trends in world military expenditure, 2024*. SIPRI.

United Nations. (2024). *Pact for the Future and Annex I: Global Digital Compact*. United Nations.

Waltz, K. N. (2000). *Structural realism after the Cold War*. *International Security*.

World Bank. (2025). *Global Economic Prospects, June 2025*. World Bank.

World Trade Organization. (2025). *Global Trade Outlook and Statistics 2025*. WTO.

World Trade Organization. (2025). *World Trade Report 2025: Making trade and AI work together to the benefit of all*. WTO.

Untuk perkembangan paling baru, berikut beberapa bacaan terkini yang relevan.

[Reuters](#)

[Reuters](#)

*Rudy C Tarumingkeng: Dunia Multipolar Abad ke-21: Dari Hegemoni Tunggal ke Persaingan Banyak Kutub*

[AP News](#)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 28 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c886bd-9718-839b-8c55-f7e402780658>